

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebudayaan, masyarakat dan lembaga pendidikan saat ini semakin mengalami perkembangan pesat, yang mengarah pada bentuk-bentuk lebih rumit dan terjadi interdependensi kompleks. Tuntutan kehidupan yang kecenderungan memerlukan adaptabilitas ekstrim terhadap berbagai segi kehidupan. Kontradiktif antara lokalitas yang mempersyaratkan eksplorasi berbagai potensi dan kemampuan internal, dengan universalitas dipihak lain, merupakan dua ekstrim kehidupan yang harus dihadapi. Diperburuk lagi krisis multidimensional yang berkepanjangan semakin memperburuk tatanan sistem kehidupan masyarakat, menyikapi kondisi tersebut sering kecenderungannya akan ditemukan siapapun orangnya akan selalu berhadapan dengan pola pikir dan pola tindak serba salah.

Dalam kondisi demikian rumitnya, pendidikan dituntut harus tetap ajeg dan konsisten sebagai suatu institusi dan atau perbuatan yang sangat diharapkan keberadaannya dapat memperbaiki kondisi atau keadaan serta persoalan bangsa. Persoalan klasik yang selalu muncul, pendidikan sering menjadi kambing hitam yang dipertanyakan serta dipandang sebagai biang keladi kebobrokan dan munculnya

persoalan bangsa, pendidikan dituding memberikan kontribusi positif terhadap masalah tersebut. Namun bila disimak konsep Durkheim (dalam Sudardja Adiwikarta, 1988:12-13), bahwa :

Pendidikan merupakan fakta sosial (social fact), yang memiliki tiga ciri utama, yaitu: pertama bahwa ia berada di luar individu, tidak seperti fakta psikologi yang berada dalam diri individu. Karena itu fakta sosial bersifat langgeng, dalam arti bahwa ia sudah ada sebelum individu lahir, dan tetap ada walaupun individu tadi meninggal dunia. Kedua; fakta sosial memiliki daya paksa terhadap individu untuk melaksanakan dan mentaatinya. Ketiga; fakta sosial itu tersebar di kalangan warga masyarakat, menjadi milik masyarakat.

Mengacu pada konsep di atas, semakin menguatkan keyakinan akan keberadaan pendidikan sebagai institusi atau lembaga yang mewariskan berbagai nilai kehidupan cukup kuat, sehingga diperlukan penataan secara proporsional aspek atau komponen apa sebenarnya yang perlu dibenahi dan dikembangkan sehingga permasalahan ataupun keberhasilan yang diduga sebagai dampak pendidikan, disimpulkan berdasarkan pada hasil kajian atau analisis dan pandangan yang komprehensif dan sistemik.

Pandangan ini penting mengingat persoalan pendidikan harus diletakan pada tatanan dan sistem yang jelas dan komprehensif, pendidikan bukanlah merupakan benda, lembaga atau sesuatu yang tunggal dan terpisah dengan sistem lainnya, secara sistemik pendidikan merupakan sistem terbuka yang senantiasa menerima dan memberi pengaruh dari sistem lainnya.

Secara lebih khusus Djudju Sudjana, (1999:1) dalam kaitannya dengan kontribusi dan pengembangan ketenaga kerjaan, mengajukan pandangannya terhadap keberadaan pendidikan persekolahan sebagai berikut:

Sistem pendidikan kita dianggap baru mampu menyiapkan pencari kerja atau buruh (*worker society*). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat industri, pasca industri, dan masyarakat informasi pendidikan harus mampu menyiapkan masyarakat teknisi yang mampu mandiri dan menciptakan pekerjaan (*employee society*). *Worker society* pada dasarnya proletariat sedangkan *employee* adalah kognitariat. Kemajuan masyarakat dan bangsa pada era globalisasi ditopang oleh kuatnya *employee society*, bukan oleh *worker society*.

Permasalahan lain yang telah lama mengemuka dalam mengkaji pendidikan persekolahan, perhatian dan bobot penanganan pendidikan yang berat sebelah, serta berlebihan dimana pandangan dan penanganan bahwa pendidikan itu hanyalah sekolah masih merupakan kenyataan yang sulit dihilangkan. Padahal secara legalitas formal, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional sangat tegas bahwa pendidikan nasional diselenggarakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah. (pasal 10 ayat 1). Bahkan secara empiris, melalui kajian research Sutaryat Trisnamansyah, (1986), menegaskan bahwa pendidikan luar sekolah, ternyata diselenggarakan oleh hampir semua departemen dan nondepartemen.

Dalam pandangan yang lebih realistik, mengenai keberadaan pendidikan luar sekolah, Umberto Sihombing, (2000:1), menegaskan:

Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu jalur pendidikan nasional, turut bertugas dan bertanggungjawab untuk menghantarkan bangsa ini agar siap menyongsong dan mampu mengubah terpaan gelombang dahsyat globalisasi, kondisi tersebut dijadikannya peluang dan kemudian mengelolanya menjadi kekuatan yang mampu meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Sehingga pendidikan luar sekolah dapat mengambil posisi dan peran nyata yang dinamis, proaktif, interaktif serta berorientasi jauh ke masa depan.

Dari pernyataan yang bernada positif dan mengandung makna optimisme di atas, bukan berarti pendidikan luar sekolah telah optimal dan merupakan resep mujarab yang dapat mengatasi berbagai keterlantaran pendidikan. Justru disadari oleh para praktisi maupun kalangan akademisi pendidikan luar sekolah, bahwa dalam kenyataannya pendidikan luar sekolah dihadapkan kepada permasalahan yang multidimensional, baik secara kuantitas maupun kualitas.

Secara empiris, program pendidikan luar sekolah terus berupaya dan beradaptasi dengan berbagai tuntutan serta perkembangan masyarakat, hal tersebut terlihat dari startegi yang dikembangkan Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah dan pemuda adalah pemberdayaan (empowering). Penerapan startegi ini, program-program pendidikan luar sekolah menyesuaikan dan memanfaatkan perkembangan teknologi serta disesuaikan dengan

kondisi lingkungan sosial budaya masyarakat, kelembagaan pendidikan luar sekolah dikelola oleh, dari, dan untuk masyarakat serta merupakan milik masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)*. Pemerintah mendudukkan posisi dan berperan sebagai motivator dan fasilitator. Strategi ini ditempuh untuk meningkatkan peran serta masyarakat (partisipasi) dalam penyelenggaraan dan pengelolaan program pendidikan luar sekolah.

Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar sebagai institusi atau lembaga pendidikan masyarakat yang penuh dengan nuansa partisipasi masyarakat keberadaannya relatif lama, dan kecenderungannya telah menghembuskan angin baru dalam merealisasikan demokrasi pendidikan. Atas dasar pemikiran tersebut, melalui tulisan ini penulis mencoba melakukan analisis deskriptif terhadap salah satu program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu Kelompok Belajar Usaha.

B. Fokus dan Masalah Penelitian

Pendidikan luar sekolah sebagai salah satu institusi dan atau proses pendidikan masyarakat, keberadaannya melekat dengan tatanan sistem serta norma dalam masyarakat. Demikian halnya dengan PKBM sebagai salah satu kelembagaan pendidikan luar

sekolah, dikembangkan atas dasar prinsip-prinsip pendidikan yang indigenous (berasal dari dalam masyarakat), mempersyaratkan keterlibatan (partisipasi) berbagai unsur masyarakat secara penuh.

Dilain pihak, karakteristik nilai dan atau budaya masyarakat yang semakin pluralistik, egoisme etnis, serta arogansi kelompok kecenderungan semakin menjejala dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kondisi seperti ini sudah barang tentu mengandung potensi konflik serta sulitnya menggalang potensi masyarakat. Secara khusus dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Terdapat sejumlah instansi, baik pemerintah maupun swasta termasuk LSM melakukan kolaborasi dengan pengelola PKBM Al-Kamilah Selaawi Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan program kelompok belajar usaha (KBU).
2. Terdapat sejumlah kegiatan atau program lintas sektoral (pemerintah) yang memungkinkan dapat bermitra dengan PKBM Al-Kamilah Selaawi Kabupaten Garut, melalui integrasi dan koordinasi menjadi program terpadu (integrated program).
3. Terdapat sejumlah potensi dan fasilitas pendidikan masyarakat yang belum dimanfaatkan secara optimal, untuk pengembangan sumber daya manusia melalui proses pendidikan.

4. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, menuntut adanya sinergi dari berbagai potensi untuk mengoptimalkan kualitas kehidupan masyarakat.

Berangkat dari berbagai keterbatasan, bila dikaitkan dengan luasnya cakupan permasalahan yang dapat dikaji dalam kaitannya dengan pelaksanaan program Kelompok Belajar Usaha di PKBM. Tampaknya masalah koordinasi menjadi kunci strategis dalam mengoptimalkan PKBM sebagai salah satu lembaga potensial dalam pemberdayaan masyarakat yang berdimensi otonomisasi dan demokratis. Mengacu pada masalah strategis tersebut, penulis bermaksud mengkaji dalam konteks yang terbatas melalui studi yang bersifat eksploratoris mengenai deskripsi mekanisme koordinasi dalam menggali potensi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan program kelompok belajar usaha di PKBM Al-Kamilah Selaawi Kabupaten Garut.

Untuk lebih mengarahkan penelitian ini, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut: bagaimanakah mekanisme koordinasi dalam menggali potensi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan program Kelompok Belajar Usaha yang secara mapan diberlakukan di PKBM Al-Kamilah Kecamatan Selaawi Kabupaten Garut ?



C. Tujuan Penelitian

Untuk memberikan arah dalam penelitian ini, penulis merumuskan tujuan penelitian berikut:

1. Mendeskripsikan profil penyelenggara PKBM Al-Kamilah Selaawi Kabupaten Garut dalam membelajarkan masyarakat melalui program Kelompok Belajar Usaha (KBU).
2. Mendeskripsikan mekanisme koordinasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara PKBM Al-Kamilah dalam menggali potensi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas program Kelompok Belajar Usaha (KBU).
3. Mendeskripsikan kendala-kendala penyelenggaraan PKBM Al-Kamilah dalam meningkatkan produktivitas penyelenggaraan program Kelompok Belajar Usaha (KBU).
4. Mendeskripsikan upaya peningkatan produktivitas penyelenggaraan program Kelompok Belajar Usaha (KBU) di PKBM Al-Kamilah.

D. Pertanyaan Penelitian

Dalam membuktikan asumsi penelitian ini, selanjutnya diajukan pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana profil penyelenggara PKBM Al-Kamilah dalam membelajarkan masyarakat melalui program Kelompok Belajar Usaha (KBU) ?

2. Bagaimana mekanisme koordinasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara PKBM Al-Kamilah dalam menggali potensi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan program Kelompok Belajar Usaha (KBU)?
3. Apakah yang muncul pada penyelenggaraan PKBM Al-Kamilah dalam membelajarkan masyarakat melalui program Kelompok Belajar Usaha (KBU) ?
4. Bagaimana upaya peningkatan produktivitas penyelenggaraan program Kelompok Belajar Usaha di PKBM Al-Kamilah ?

E. Penjelasan Istilah

1. Profil adalah pandangan, lukisan, gambaran atau ikhtiar yang memberi fakta tentang hal-hal khusus. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 : 789). Profil dalam penelitian ini mengenai gambaran secara menyeluruh dan khusus tentang penyelenggaraan PKBM Al-Kamilah dalam membelajarkan serta menggali potensi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas penyelenggaraan program Kelompok Belajar Usaha.
2. Koordinasi, perihal mengatur suatu organisasi dan cabang-cabangnya sehingga peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpangsiur. (Balai Pustaka, 1995:524)



3. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya), (Balai Pustaka, 1995:642).
4. Potensi masyarakat, dimaksudkan berbagai sumber daya (resources) yang ada di dalam masyarakat yang dipandang sangat tepat dapat menunjang terlaksananya program pendidikan luar sekolah. Sumber daya tersebut dimaksudkan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam (fisik ataupun psikhis)..
5. Pembelajaran, berasal dari kata dasar belajar. Belajar ditinjau dari dua segi, yaitu belajar sebagai proses dan sebagai hasil. Sebagai proses, diartikan upaya yang wajar melalui penyesuaian tingkah laku. (Travers, 1972; Delker, 1974; Gage and Berliner, 1984). Belajar sebagai hasil, adalah perubahan tingkah laku yang diperoleh dari kegiatan belajar (Cagne, 1972; Coombs, 1985). Membelajarkan diartikan sebagai kegiatan sistematis dan dilakukan secara sengaja oleh sumber belajar untuk membantu warga belajar agar pihak yang disebut terakhir itu melakukan kegiatan belajar. Selanjutnya pembelajaran merupakan setiap upaya sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi agar terjadi kegiatan belajar membelajarkan. Dalam kegiatan ini terjadi interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik (warga belajar) yang melakukan kegiatan belajar dengan pendidik (warga belajar) yang

melakukan kegiatan belajar dengan pendidik (sumber belajar) yang melakukan kegiatan membelajarkan. (Djudju Sudjana, 1993:5-6).

6. PKBM singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, adalah suatu tempat untuk mengintensifkan dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan pembelajaran Kelompok Belajar Usaha, pelaksanaannya dipusatkan di suatu tempat dengan status pengelolaannya dan pemilikannya adalah oleh dan untuk masyarakat. (U.Sihombing, 1999)
7. KBU singkatan dari Kelompok Belajar Usaha yaitu salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang berupaya membelajarkan masyarakat dalam bentuk kelompok, dengan orientasi pada proses belajar dan berusaha.
8. Kendala adalah halangan, rintangan, faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 : 477). Kendala-kendala dalam penelitian ini adalah kesulitan atau hambatan yang ditemukan pada penyelenggaraan PKBM Al-Kamilah dalam membelajarkan masyarakat.
9. Produktivitas adalah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995 : 789). Peningkatan produktivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

mewujudkan suatu hasil yang maksimal pada penyelenggaraan program Kelompok Belajar Usaha.

F. Kerangka Berfikir

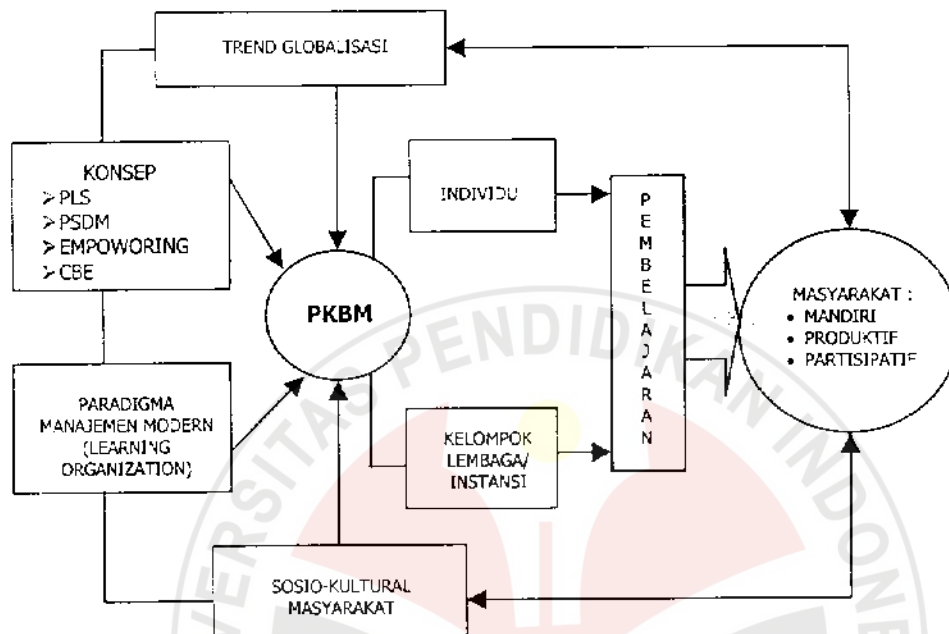
Globalisasi merupakan suatu fenomena kehidupan yang bisa menutup dan tuntutan dan perkembangan dunia, namun demikian kebijakan otonomi daerah menuntut pada kesiapan masyarakat dalam bertindak dan berbuat yang lebih efisien dan realistis dalam menggali dan memanfaatkan berbagai potensinya.

Pendidikan luar sekolah secara konseptual teoritis berkenaan dengan pengembangan sumber daya manusia melalui penerapan berbagai prinsip dan konsep empowering atau pemberdayaan. Secara konseptual dikembangkan pula pemikiran Community Based Education (CBE), berdasarkan pada aspek sosio-kultural. Di dalam implementasinya, secara manajerial pengembangan program-program pendidikan luar sekolah bersandar pada paradigma manajemen modern yang learning organization.

PKBM sebagai salah satu wujud kelembagaan pendidikan luar sekolah, yang ditopang pemikiran-pemikiran di atas, programnya diarahkan pada pelayanan individu, kelompok maupun lembaga masyarakat. Dari segi prosesnya PKBM di orientasikan kepada

terjadinya proses belajar dan berusaha, dengan tujuan terwujudnya masyarakat yang mandiri, produktif dan partisipatif.

Secara skematis, kerangka konseptual/berfikir penelitian ini disajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 1 : Kerangka konseptual/berfikir

Sesuai dengan karakteristik permasalahan yang hendak diungkapkan melalui penelitian ini, pendekatan yang dipandang tepat dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Metode yang diterapkan adalah deskriptif analitik melalui pengungkapan gejala yang telah dan sedang terjadi (*expose facto*). Dengan demikian teknik pengumpulan data serta model analisisnya, akan diterapkan sesuai dengan kaidah-kaidah penelitian kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

Secara lebih terperinci, tulisan ini penulis kembangkan dengan menerapkan sistematika sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi mengenai; latar belakang masalah, fokus dan masalah penelitian, tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan pustaka, merupakan deskripsi dan beberapa konsep Pendidikan Luar Sekolah, konsep pembelajaran; PKBM dan CBE, koordinasi dan konsep pemberdayaan masyarakat.

Bab III Metodologi penelitian, meliputi; metode, teknik, prosedur, serta instrumen dan analisis hasil penelitian.

Bab IV gambaran hasil penelitian; berupaya mendeskripsikan fokus permasalahan serta menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan.

Bab V berisikan mengenai; kesimpulan dan rekomendasi terhadap temuan dan kajian hasil penelitian.